

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan wajib mematuhi norma sosial yang ada dimasyarakat. Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan agar terlihat *legitimate* dimata masyarakat. Perusahaan akan cenderung bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan (Cahya, 2017).

Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku dalam sebuah organisasi (Nurdiawansyah, 2017). Organisasi menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang sudah melekat pada kegiatannya dengan mengacu pada norma-norma perilaku yang sudah terbentuk sebelumnya melalui sistem sosial masyarakat, dimana organisasi adalah bagian dari suatu sistem tersebut. Reaksi terhadap batasan tersebut mampu mendorong dalam upaya pentingnya analisis perilaku organisasi dengan cara memperhatikan lingkungannya. Ketika legitimasi diperoleh maka perusahaan dapat terus melanjutkan operasinya karena perusahaan telah memperhatikan norma yang berlaku serta keadaan masyarakat dan lingkungan sekitar (Anggraeni, 2015).

Adanya aktivitas perusahaan ditengah-tengah masyarakat memunculkan permintaan masyarakat agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Teori legitimasi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan motivasi pengungkapan emisi karbon oleh suatu organisasi. Teori legitimasi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membuat laporan pertanggungjawaban lingkungan, yang di dalamnya memuat pengungkapan informasi emisi GRK, hal tersebut menjadi salah satu

upaya industri untuk melaporkan operasi usahanya dalam rangka mengeksplorasi, mengendalikan, serta menjaga alam dan lingkungan. Informasi pengungkapan emisi GRK tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan agar dapat tetap menjalani usahanya.

Nilai dan norma yang terlihat dalam kontrak sosial telah berubah seiring berjalannya waktu. Di masa lalu, legitimasi hanya dilihat dari segi kinerja ekonomi dan untuk perkembangan bisnis sekarang diharapkan suatu organisasi mempertimbangkan dalam berbagai masalah, termasuk konsekuensi lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka (Budiharta & Kacaribu, 2020). Berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku (Irwhantoko & Basuki, 2016).

Industri menjadi salah satu faktor utama yang berpartisipasi dalam kerusakan alam karena bahan baku yang digunakan mengandung berbagai zat kimia dan emisi yang dikeluarkan oleh industri akan sangat berpotensi mencemari udara. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban lingkungan, yang di dalamnya memuat pengungkapan informasi emisi GRK, menjadi salah satu upaya industri untuk melaporkan operasi usahanya dalam rangka mengeksplorasi, mengendalikan, serta menjaga alam dan lingkungan. Informasi pengungkapan emisi GRK tersebut diharapkan dapat membantu penciptaan nilai tambah bagi entitas agar dapat tetap *sustain* menjalani usahanya.

Legitimasi merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan dari masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku.

2.2 Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*)

Emisi karbon (*carbon emission*) didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke atmosfer bumi. Pelepasan terjadi karena adanya proses pembakaran terhadap karbon baik dalam bentuk tunggal maupun senyawa. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014) gas-gas ini dapat berbentuk *karbondioksida* (CO₂), *metana* (CH₄), *nitro oksida* (N₂O), *hydrofluorocarbons* (HFCs), *perfluorocarbons* (PFCs) dan *sulfur hexafluoride* (SF₆). Dari semua jenis gas tersebut, gas rumah kaca utama adalah CO₂, CH₄ dan N₂O. Dari ketiga jenis gas ini, yang paling banyak kandungannya di atmosfer adalah *karbondioksida* (CO₂).

Emisi karbon atau pun gas rumah kaca berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu gas rumah kaca alami dan gas rumah kaca industri. Gas rumah kaca alami merupakan bagian dari siklus alam yang dapat dengan mudah dinetralisir oleh tumbuhan dan lautan. Gas rumah kaca alami menguntungkan bagi makhluk hidup karena dapat menjaga *temperature* bumi tetap hangat dikisaran 6°C sedangkan gas rumah kaca industri berasal dari kegiatan *industrial* yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas manusia membuat kadar *karbondioksida* menjadi lebih padat sehingga alam tidak dapat menyerap seluruh *karbondioksida* yang tersedia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2012).

Pengungkapan ke publik adalah salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk melegitimasi aktivitasnya (Suhardi, 2015). Transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh perusahaan dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Secara umum, perusahaan akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan telah diatur oleh regulasi, salah satunya yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertuang dalam PSAK No. 1 (revisi 2009).

Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*) merupakan salah satu contoh dari pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang telah dinyatakan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009). Pengungkapan lingkungan mencakup intensitas GHG *emissions* atau gas rumah kaca dan penggunaan energi, *corporate governance* dan strategi dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kinerja terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca, risiko dan peluang terkait dampak perubahan iklim (Jannah, 2014).

Dalam penelitian ini, *Carbon Emission Disclosure* diukur dengan menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi et al., (2013). Lima kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon sebagai berikut (Choi et al., 2013) :

1. Risiko dan peluang perubahan iklim (CC / *Climate Change*)
2. Emisi gas rumah kaca (GHG / *Greenhouse Gas*)
3. Konsumsi energi (EC / *Energy Consumption*)
4. Pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC / *Reduction and Cost*)
5. Akuntabilitas emisi karbon (AEC / *Accountability of Emission Carbon*).

Dalam lima kategori tersebut, terdapat 18 item yang diidentifikasi. Metode pengukuran yang digunakan dalam *Carbon Emission Disclosure* ini adalah *content analysis*. Metode ini mengubah informasi kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat diolah dalam perhitungan statistik. Artinya, total angka yang didapat dari proses *content analysis* ini menggambarkan banyaknya pengungkapan yang diinformasikan dalam laporan tersebut.

Tabel 2.1
Carbon Emission Disclosure Checklist

Kategori	Item
Perubahan Iklim: Risiko dan Peluang (CC / <i>Climate Change</i>)	CC1 : Penilaian / deskripsi dari risiko yang berhubungan dengan perubahan iklim dan aksi yang dilakukan untuk mengatasi risiko.

	CC2: Penilaian / deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, implikasi bisnis dan peluang dari perubahan iklim.
Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca (<i>Greenhouse Gas / GHG</i>)	GHG1: Deskripsi tentang metodologi yang digunakan untuk mengkalkulasi (menghitung) emisi gas rumah kaca.
	GHG2: Keberadaan verifikasi dari pihak eksternal dalam mengukur jumlah emisi GRK.
	GHG3: Total emisi GRK yang dihasilkan.
	GHG4: Pengungkapan lingkup 1, lingkup 2, atau lingkup 3 emisi GRK.
	GHG5: Pengungkapan sumber emisi GRK.
	GHG6: Pengungkapan fasilitas atau segmen dari GRK.
	GHG7: Perbandingan emisi GRK dengan tahun sebelumnya.
Konsumsi Energi (<i>EC / Energy Consumption</i>)	EC1 : Total energi yang dikonsumsi.
	EC2 : Kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber terbarukan.
	EC3 : Pengungkapan menurut tipe, fasilitas atau segmen.
Biaya dan Pengurangan GHG (<i>RC / Reduction and Cost</i>)	RC1 : Rencana atau strategi detail untuk mengurangi emisi GRK.
	RC2 : Spesifikasi dari target tingkat / level dan tahun untuk mengurangi emisi GRK.
	RC3 : Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (<i>cost or saving</i>) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi karbon.
	RC4 : Biaya dari biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (<i>capital expenditure planning</i>).
Akuntabilitas Emisi Karbon (<i>AEC / Accountability of Emission Carbon</i>)	ACC1 : Indikasi dari Dewan Komite yang bertanggung jawab atas tindakan yang berhubungan dengan perubahan iklim.
	ACC2 : Deskripsi dari mekanisme dimana dewan meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan iklim.

Sumber: Choi et al., (2013)

2.3 Variabel–Variabel Yang Terkait Dengan Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*)

2.3.1 *Media Exposure*

Media Exposure memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Media merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan untuk menyediakan informasi ke masyarakat luas. Media menjadi alat pengontrol aktivitas yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan perlu mempertimbangkan keberadaan media. Perusahaan akan meminimalisir terjadinya kesalahan yang akan dibuat demi reputasi perusahaan terhadap masyarakat. Pemberitaan media dapat mempengaruhi sikap publik terhadap perusahaan yang selanjutnya dapat mempengaruhi *stakeholder*. Dinamika antara *stakeholder* dan pemberitaan media (*media coverage*) mempunyai dampak yang penting terhadap pengungkapan lingkungan secara sukarela (Dawkins & Fraas, 2011).

Peningkatan pemberitaan media terhadap kebijakan lingkungan dan iklim meningkatkan peran organisasi-organisasi non pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang selanjutnya menandakan adanya pergeseran terhadap opini publik. Hal tersebut memungkinkan bahwa peran pemberitaan media secara simultan menentukan strategi pengungkapan perusahaan. Berkaitan dengan isu perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, media juga mengambil peran dalam memantau aktivitas perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim tersebut.

Dengan adanya pemberitaan melalui media, *stakeholder* menjadi lebih cepat mengerti mengenai lingkungan sekitar dan mengambil sikap atas berita tersebut. Terdapatnya media di suatu negara sebagai pengontrol aktivitas perusahaan, maka perusahaan perlu mempertimbangkan keberadaan media tersebut. Jika terdapat isu negatif mengenai perusahaan, maka masyarakat mungkin akan mengecam aktivitas perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan tersebut (Jannah, 2014).

2.3.2 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran bagaimana tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Tanggung jawab lingkungan perusahaan mencakup area yang cukup luas, bahkan diluar wilayah perusahaan itu sendiri. Kinerja lingkungan yang baik akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Kinerja lingkungan merupakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih. Sesuai teori legitimasi, hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat mengharuskan perusahaan mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Salah satunya dengan menjaga lingkungan, jika perusahaan ingin memperoleh legitimasi dari masyarakat. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan berusaha mengkomunikasikan kinerjanya dalam bentuk pengungkapan lingkungan (Majid, 2015).

Dalam teori legitimasi menjelaskan tentang interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Dengan adanya kecenderungan dari perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan baik akan melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tetap terjaga dan masyarakat tetap memberikan dukungan penuh kepada perusahaan. Di Indonesia pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan sukarela, namun sudah saatnya perusahaan lebih memperhatikan mengenai aspek lingkungan mengingat dampak yang telah dihasilkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan. Publik memberikan perhatian yang besar terhadap kinerja lingkungan dan selalu menuntut agar perusahaan lebih peka terhadap isu lingkungan. Perusahaan harus senantiasa meningkatkan kualitas kinerja lingkungan agar dapat menyesuaikan dengan harapan yang diberikan publik (Suhardi, 2015).

Kinerja lingkungan yang baik akan cenderung untuk melakukan pengungkapan emisi karbon secara lebih luas. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia membuat suatu peringkat penghargaan kinerja lingkungan perusahaan yaitu PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam

pengelolaan lingkungan hidup) sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Kinerja lingkungan perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi dampak negatif lingkungan pada lokasi perusahaan tersebut beroperasi (Anggraeni, 2015). Dengan adanya PROPER, diharapkan para *stakeholder* dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan ini, dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam melaporkan informasi terkait kinerja perusahaan termasuk kinerja lingkungannya. Masyarakat dan *stakeholders* memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai kinerja perusahaan termasuk kinerja lingkungan. Bentuk komunikasi dan tanggung jawab perusahaan terkait kinerja lingkungan salah satunya adalah dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca di dalam laporan perusahaan. Laporan ini nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi perusahaan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu pengungkapan ini merupakan dasar bagi transparansi perusahaan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan *stakeholders* tentang bagaimana perusahaan mengatasi resiko yang terjadi dari adanya perubahan iklim dan pemanasan global (Prafitri & Zulaikha, 2016).

2.3.3 Corporate Governance

Corporate governance memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh mereka yang mengelola korporasi sesuai dan menyediakan sarana untuk memantau aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan itu sendiri. Ini terutama berkaitan dengan mengelola hubungan antara pemegang saham, manajer kunci perusahaan, seperti dewan direksi, direktur, manajer senior lainnya, dan pemangku kepentingan lainnya (Rankin et al., 2011). Perusahaan mungkin memiliki beragam struktur dan sistem yang mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik. Contoh praktik *corporate governance* adalah komite audit, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan manajerial. Besar kecilnya dewan direksi dapat mempengaruhi efektivitas tugas dan tanggung jawab mereka. Fungsi komite audit adalah mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi yang diberikan oleh

perusahaan. Tugasnya adalah mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan. Manajer yang juga merupakan pemegang saham, cenderung lebih peduli dan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pemegang saham. Antara lain kebutuhan pemegang saham akan transparansi dan akuntabilitas informasi.

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali atas investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi (Nainggolan et al., 2018). Oleh karena itu, sistem tersebut harus membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. *Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar (Arafat, 2008, p. 10), yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sertalebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan nilai *shareholder* dan dividen.

2.3.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan (Downes & Budhidarmo, 2011). Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang.

Kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* karena dengan memiliki saham perusahaan, diharapkan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu

konsekuensi dari kepemilikan saham. Untuk itu, semakin besar kepemilikan manajerial terhadap perusahaan maka informasi yang diungkapkan semakin tinggi termasuk informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan, Manajer sebagai pemilik sekaligus pengelola akan bertindak untuk investasinya serta untuk perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka akan semakin mendorong manajer perusahaan melakukan usaha lebih untuk memberikan keuntungan pada perusahaan. Salah satu usaha tersebut yaitu melakukan pengungkapan *sustainability report* (Aniktia & Khafid, 2015).

2.3.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah satu dari kepemilikan terkonsentrasi dan diukur dengan presentase dari saham institusional dibandingkan dengan total saham beredar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Investasi yang dilakukan sangat mempengaruhi pengawasan oleh investor institusional. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen. Investor institusional dianggap lebih paham tentang pentingnya kontrak sosial dan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan serta menyadari adanya biaya keagenan yang mungkin muncul, sehingga membuat tanggung jawab sosial masuk ke dalam komponen pengawasan dan evaluasi. Institusi dianggap sebagai pihak yang paling mampu dalam mengawasi dan mengelola investasinya, baik dari segi pengetahuan, sistem informasi, maupun sumber daya yang dimiliki (Krisna & Suhardianto, 2016).

Menurut Widyaningsih et al., (2017) pemantauan pasti akan menjamin kesejahteraan bagi pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai regulasi agen ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dipasar modal sehingga dapat menghambat perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional yang lebih besar akan meningkatkan pemantauan perusahaan, sehingga mengungkap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan citra positif kepada *stakeholders*. Pengungkapan lingkungan akan meningkatkan nilai perusahaan dan membantu dalam pengembangan

berkelanjutan perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen dalam perusahaan serta bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan akan dinilai baik salah satunya dengan melakukan pengungkapan. Besarnya pengungkapan yang dilakukan perusahaan memberikan sinyal bagi investor institusional dalam menentukan keputusan investasi. Investasi yang dilakukan sangat mempengaruhi pengawasan oleh investor institusional.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan akan diawasi agar dapat memberikan citra baik kepada publik dengan melakukan tanggung jawab sosial berupa *carbon emission disclosure* (Zanra et al., 2020).

2.3.3.3 Dewan Komisaris Independen

Keberadaan dewan komisaris independen sebagai bagian dari penerapan *good corporate governance* akan mendorong kemungkinan perusahaan melakukan pengungkapan lebih untuk para *stakeholder*, salah satunya dengan pengungkapan *sustainability report* (Aniktia & Khafid, 2015). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa manajemen perusahaan telah melaksanakan tata kelola yang baik.

Dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Zanra et al., 2020). Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi mampu mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas serta membuat manajemen lebih efektif melalui pemantauan dan pengungkapan yang lebih baik.

Dewan komisaris independen dinilai lebih peka terhadap tuntutan sosial, menemukan diri mereka pada posisi yang lebih baik daripada anggota dewan eksekutif untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Perilaku tersebut dimungkinkan karena komisaris independen tidak menghadapi tekanan yang sama dari pemangku kepentingan seperti yang ditemui oleh anggota dewan eksekutif. Oleh karena itu, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi lebih cenderung mengalihkan sumber daya untuk melegitimasi operasi organisasi dan untuk menunjukkan bahwa aktivitas mereka sesuai dengan harapan masyarakat (Yunus et al., 2016).

2.3.3.4 Dewan Direksi

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar. Dapat disimpulkan bahwa dewan direksi berperan dan bertanggung jawab dalam memastikan perusahaan telah menjalankan ketentuan dalam anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku (Manurung et al., 2017).

Teori legitimasi menyatakan bahwa manajemen akan berusaha meraih legitimasi dari para pemangku kepentingan. Dewan direksi merupakan elemen penting tertinggi dari manajemen yang bertanggung jawab atas perolehan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk memperoleh legitimasi tersebut, perusahaan senantiasa melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, yaitu dengan melakukan pengungkapan lingkungan.

Ukuran dewan direksi mencerminkan mekanisme tata kelola perusahaan karena pengambilan keputusan direksi akan mempertimbangkan pendapat anggota direksi. Semakin besar ukuran dewan direksi, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Krisna et al, 2016). Semakin besar ukuran dewan direksi, maka akan semakin baik pengelolaan perusahaan sehingga semakin besar kemampuan perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungannya.

2.3.3.5 Komite Audit

Pengawasan komite audit mendorong pelaksanaan GCG yang efektif. Pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip GCG dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan dan kemudian melakukan pelaporan (Aniktia & Khafid, 2015). Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap manajemen (Anggraeni, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Akhiroh & Kiswanto(2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Komite audit mempunyai peran penting dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan termasuk dalam pengungkapan lingkungan.

Melalui intensitas pertemuan menjadi salah satu proksi yang dapat mencerminkan kualitas dari komite audit (Suryono & Prastiwi, 2011). Rapat dilakukan untuk melaksanakan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi lebih baik. Semakin komite audit itu berkualitas maka perusahaan akan lebih mengerti arti strategis dari pengungkapan informasi dan yang diinginkan oleh *stakeholder* secara luas. Melalui jumlah pertemuan, komite audit akan semakin mampu mendorong manajemen untuk melaksanakan praktik pengungkapan emisi karbon sebagai media komunikasi perusahaan dengan para *stakeholder* untuk mendapat legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*. Semakin sering

mengadakan pertemuan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik pula sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan dapat mendukung peningkatan pengungkapan informasi emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan (Saptiwi, 2019).

2.3.3.6 Umur Dewan Direksi

Hubungan perusahaan dengan masyarakat membuat direksi yang lebih dewasa merespon tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Direksi yang lebih dewasa juga membawa pengalaman dan kedewasaan, dan pimpinan perusahaan yang lebih tua mengakui praktik yang lebih baik untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan lingkungan (Fernandes et al., 2019). Dengan melakukan pengungkapan lingkungan, perusahaan akan dengan mudah memperoleh legitimasi dari masyarakat.

2.3.3.7 Tingkat Pendidikan Komisaris

Komisaris dengan tingkat pendidikan yang tinggi, membuat mereka lebih mengetahui dan memiliki wawasan yang luas mengenai langkah apa yang akan diambil untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder perusahaan. Memiliki pengetahuan yang tinggi membuat komisaris melakukan pengawasan yang lebih optimal, sehingga terciptanya transparansi antara perusahaan dengan para *stakeholder*, yaitu dengan pengungkapan emisi karbon. Tingkat pendidikan dewan perusahaan dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan mereka (Fernandes et al., 2019). Pendidikan komisaris yang tinggi mencerminkan perilaku mereka yang taat terhadap aturan perusahaan, dan untuk memperoleh dukungan dari *stakeholder* perusahaan akan melakukan tanggung jawab sosialnya melalui pengungkapan emisi karbon.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian dunia mengenai perubahan iklim yang salah satu dampaknya mengancam kegiatan bisnis perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya meneliti berbagai faktor yang

mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmennya terhadap lingkungan. Pada tabel 2.3 disajikan referensi beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan *carbon emission disclosure*.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Akhiroh & Kiswanto (2016)	<i>The Determinant of Carbon Emission Disclosure this study was the non-financial companies which listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2014.</i>	Independen: 1. Kinerja Lingkungan 2. Visibilitas Organisasi 3. Profitabilitas 4. <i>Financial Distress</i> 5. Kepemilikan Manajerial 6. Kepemilikan Institusional 7. Proporsi Komisaris Independen 8. Komite Audit Dependen: 1. <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Visibilitas Organisasional, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Sedangkan Kinerja Lingkungan, <i>Financial Distress</i> , Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
2	Manurung et al., (2017)	Peran <i>Corporate Governance</i> dan Komite Lingkungan dalam Pengungkapan Gas Rumah Kaca pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016.	Independen: 1. Dewan Komisaris independen 2. Direksi 3. Keragaman <i>Gender</i> 4. Komite Lingkungan Dependen: 1. Pengungkapan Emisi GRK	Keragaman <i>Gender</i> dan Komite Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Gas Rumah Kaca. Sementara Dewan Komisaris Independen dan Direksi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Gas Rumah Kaca.

3	Apriliana (2019)	Pengaruh Tipe Industri, Kinerja Lingkungan dan Profitabilitas Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> pada Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode Tahun 2015-2017.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe Industri 2. Kinerja Lingkungan 3. Profitabilitas <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Carbon Emission Disclosure</i> 	Tipe Industri dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Sedangkan Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
4	Trireksani & Djajadikerta (2016)	<i>Corporate Governance and Environmental Disclosure in the Indonesian Mining Industry.</i>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Direksi 2. Proporsi Direktur Perempuan 3. Dewan Komisaris Independen <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Environmental Disclosure</i> 	Ukuran Dewan Direksi memiliki hubungan signifikan positif terhadap Pengungkapan Lingkungan. Sedangkan Proporsi Direktur Wanita dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Lingkungan.
5	Amaliyah & Solikhah (2019)	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan <i>sustainability report</i> periode 2013-2017.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Lingkungan 2. Kepemilikan Manajerial 3. Kepemilikan Institusional 4. Komisaris Independen 5. Dewan Direksi 6. Komite Audit 7. Umur Dewan Direksi 8. Tingkat Pendidikan Komisaris <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan Emisi GRK (<i>Carbon Emission Disclosure</i>) 	Kepemilikan Institusional dan Komite Audit yang tinggi mampu meningkatkan Pengungkapan Emisi Karbon. Sementara Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Dewan direksi, Umur Dewan Direksi, dan Tingkat Pendidikan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

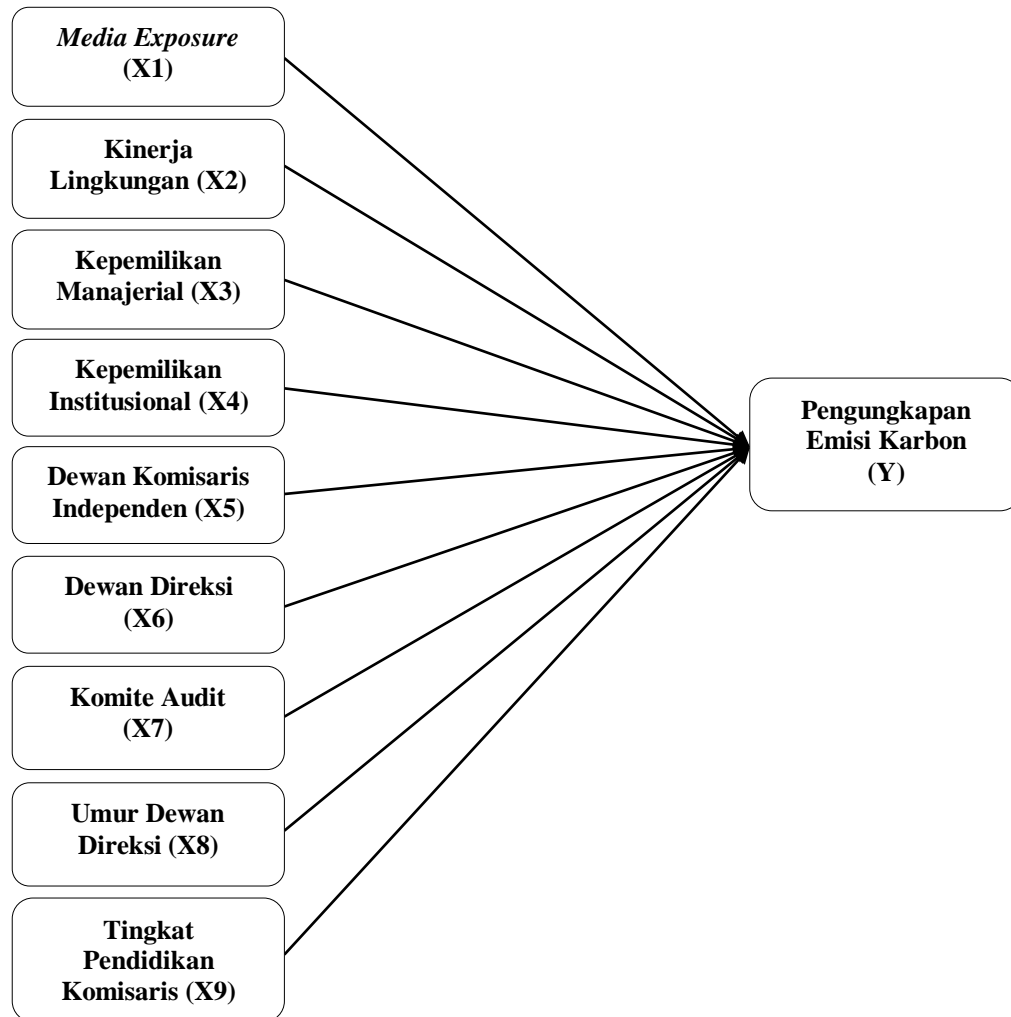
6	Septriyawati & Anisah (2019)	Pengaruh <i>Media Exposure</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.	Independen: 1. <i>Media Exposure</i> 2. Ukuran Perusahaan 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> Dependen: 1. <i>Carbon Emission Disclosure</i>	<i>Media Exposure</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Sementara Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
7	Zanra et al., (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> dengan Kinerja Lingkungan sebagai Variabel <i>Moderating</i> pada Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar pada BEI periode Tahun 2013-2017.	Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Ukuran Dewan Komisaris 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 4. Keragaman <i>Gender</i> 5. Ukuran Perusahaan 6. <i>Leverage</i> 7. Profitabilitas Dependen: 1. <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Keragaman <i>Gender</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> . Sementara variabel <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> . Kinerja Lingkungan juga dapat memoderasi hubungan variabel independen terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> .

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi sembilan variabel independen yaitu *media exposure*, kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, umur dewan direksi dan tingkat pendidikan komisaris. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu

kerangka konseptual seperti pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh *Media Exposure* Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori legitimasi secara luas menguji peran yang dimainkan oleh berita media pada peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap perusahaan, media mempunyai peran penting pada pergerakan mobilisasi sosial. Informasi mengenai aktivitas perusahaan juga termasuk dalam informasi yang dapat dikomunikasikan kepada masyarakat serta pemberitaan media dapat mempengaruhi sikap publik terhadap perusahaan yang selanjutnya dapat mempengaruhi *stakeholder*. Hasil penelitian Septriyawati & Anisah (2019)

memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon karena media merupakan salah satu sarana efektif yang mana didukung dengan pengguna yang semakin banyak sehingga membuat perusahaan semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan sukarelanya dengan tujuan mendapat legitimasi masyarakat dan mendapat tanggapan positif oleh para *stakeholder*.

H1 : *Media Exposure* berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kinerja lingkungan merupakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih. Sesuai teori legitimasi, hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat mengharuskan perusahaan mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Salah satunya dengan menjaga lingkungan, jika perusahaan ingin memperoleh legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, kinerja lingkungan yang baik akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ma'sum & Rosyidi (2018) kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan cenderung untuk melakukan pengungkapan emisi karbon secara lebih luas.

H2 : Kinerja Lingkungan berpengaruh Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* karena dengan memiliki saham perusahaan, diharapkan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi dari kepemilikan saham. Salah satu cara bagi manajer untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela

secara lebih luas dalam laporan tahunan, strategi bisnis manajemen dan kinerja perusahaan dengan lebih lengkap, termasuk kinerja lingkungan guna pengambilan keputusan (Soesetio, 2008). Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan manajerial terhadap perusahaan maka informasi yang diungkapkan semakin tinggi termasuk informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Akhiroh & Kiswanto (2016) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon dengan lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan.

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Menurut Hermawan et al., (2018), tingginya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan perusahaan, sehingga cenderung akan mengungkapkan semua kegiatan perusahaan, yang dapat meningkatkan *image* positif bagi para *stakeholder*. Semakin tinggi kepemilikan institusional menunjukkan hak suara yang tinggi bagi investor institusi dalam perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Amaliyah & Solikhah (2019) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan akan diawasi agar dapat memberikan citra baik kepada publik dengan melakukan tanggung jawab sosial berupa *carbon emission disclosure* (Zanra et al., 2020).

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hubungan perusahaan dengan *stakeholder* membuat perusahaan untuk memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. Adanya komisaris independen akan membawa perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan prinsip transparansi dengan melakukan pengungkapan lebih untuk para *stakeholder* melalui pengungkapan emisi karbon. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan dukungan dan legitimasi dari *stakeholder*. Semakin besar proporsi komisaris independen maka perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan (Akhiroh & Kiswanto, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Niza & Ratmono (2019) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi lebih cenderung mengalihkan sumber daya untuk melegitimasi operasi organisasi dan untuk menunjukkan bahwa aktivitas mereka sesuai dengan harapan masyarakat (Yunus et al., 2016).

H5 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.6 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Dewan direksi merupakan elemen penting tertinggi dari manajemen yang bertanggung jawab atas perolehan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk memperoleh legitimasi tersebut, perusahaan senantiasa melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, yaitu dengan melakukan pengungkapan lingkungan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan melakukan aktivitasnya harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ukuran dewan direksi menggambarkan tata kelola perusahaan tersebut, karena pengambilan keputusan oleh direksi mempertimbangkan pendapat dari para anggota direksinya (Krisna & Suhardianto, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Trireksani & Djajadikerta (2016) dan Che Ahmad & Osazuwa, (2015) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Semakin besar ukuran dewan direksi maka akan semakin baik pengelolaan perusahaan, sehingga semakin besar kemampuan perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungannya dengan pengungkapan laporan emisi karbon.

H6 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.7 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Perusahaan yang beroperasi dengan adanya komite audit, mendorong perusahaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG, termasuk prinsip transparansi. Karena perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas yang dilakukan, kemudian melakukan pelaporan atas aktivitas tersebut (Aniktia & Khafid, 2015). Efektivitas komite audit melalui jumlah rapatnya dapat meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan (Che Ahmad & Osazuwa, 2015). Semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit akan sangat berpengaruh terhadap keputusan apa yang harus diambil untuk memaksimalkan kepentingan *stakeholder* perusahaan, salah satunya dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan penelitian Akhiroh & Kiswanto (2016), Amaliyah & Solikhah (2019) dan Niza & Ratmono (2019) yang menemukan bukti bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan dengan frekuensi rapat komite audit yang tinggi mampu memberikan pengawasan lebih maksimal terhadap manajemen perusahaan, sehingga mampu dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan pengungkapan lingkungan.

H7 : Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.8 Pengaruh Umur Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hubungan perusahaan dengan masyarakat membuat direksi yang lebih dewasa merespon tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Direksi yang lebih dewasa juga membawa pengalaman dan kedewasaan, dan pimpinan perusahaan yang lebih tua mengakui praktik yang lebih baik untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan

lingkungan (Fernandes et al., 2019). Dengan melakukan pengungkapan lingkungan, perusahaan akan dengan mudah memperoleh legitimasi dari masyarakat. Hal tersebut mendukung bahwa faktor dari umur dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

H8 : Umur Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.9 Pengaruh Tingkat Pendidikan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Pendidikan komisaris yang tinggi mencerminkan perilaku mereka yang taat terhadap aturan perusahaan, dan untuk memperoleh dukungan dari *stakeholder* perusahaan akan melakukan tanggung jawab sosialnya melalui pengungkapan emisi karbon. Komisaris dengan tingkat pendidikan yang tinggi, membuat mereka lebih mengetahui dan memiliki wawasan yang luas mengenai langkah apa yang akan diambil untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* perusahaan. Tingkat pendidikan dewan perusahaan dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan mereka (Fernandes et al., 2019).

H9 : Tingkat Pendidikan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon